

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU pada tanggal 1 Juni 2010, surat tersebut berisikan tentang pelaksanaan pedoman akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Adapun hal-hal yang perlu diatur yaitu : (1) Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pedoman akuntansi bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; (2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR) merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK-ETAP; (3) penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPR wajib berpedoman pada PA-BPR; (4) perlakuan akuntansi keuangan BPR. Sejak 1 Januari 2010 yang masih mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dengan diberlakukannya Surat Edaran ini agar disesuaikan dengan berpedoman pada bab II PA-BPR; (5) penyesuaian sebagaimana dimaksudkan

pada angka 4 (empat) hanya dilakukan dalam rangka penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2010 untuk tujuan umum (*general purpose*). Dengan adanya perubahan penggunaan standar akuntansi keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pun memiliki tantangan dalam memahami SAK-ETAP. Tantangan tersebut antara lain kualitas KAP yang digunakan BPR, belum diterapkannya PSAK 31, masih ditemukannya BPR yang menggunakan administrasi manual, adanya *range* yang sangat luas (Total asset Rp 216 juta sampai dengan Rp 2,5 Triliun), adaptasi batas materialitas, dan kompetensi SDM yang terbatas. Penggunaan SAK-ETAP ini sifatnya mandatory dalam rangka akuntabilitas pelaporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Untuk itu, jika pada tahun buku 2011 BPR belum menerapkan SAK-ETAP dalam pelaporan keuangannya, maka laporan keuangan BPR yang bersangkutan terancam dinilai sebagai laporan keuangan yang tidak wajar dalam laporan akuntan independen. Penegasan audit tahun buku 2011 tentunya mengacu pada kriteria SAK-ETAP sehingga dampak laporan keuangan auditor dengan opini tidak wajar tentunya sangat merugikan BPR (Bali Post, 26 April 2011).

Adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU pada tanggal 1 Juni 2010, menjadi bukti kepedulian Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai regulator bank konvensional, akan keberlangsungan BPR yang dapat membantu BPR dalam menghadapi persaingan dari para pesaing yaitu bank umum. Bank umum sebagai pesaing utama BPR karena mereka juga membuka unit mikro bahkan sampai ada di tingkat kecamatan. Persaingan dari tingkat industri BPR harus siap menghadapi BUMN, Koperasi, Leasing. Untuk

membangun industri BPR yang sehat dengan segala keterbatasannya, industri BPR terbukti mampu melewati dua badai krisis yang melanda sektor keuangan yaitu krisis tahun 1997/1998 dan krisis 2007/2008 dengan tanpa meminta bantuan dari Bank Indonesia, walaupun sebenarnya BI juga menyiapkan FPJP untuk BPR melalui PBI Nomor 10/35/PBI/2008. Dengan kemandirian BPR tersebut diatas, sepantasnya perlu ada sedikit respek dan apresiasi agar BPR diikutsertakan dalam penataan industri agar dapat dilahirkan regulasi, format, mekanisme dan pengawasan BPR yang lebih adil dalam rangka membangun BPR yang sehat dan berkesinambungan. Fx.Soegeng, Seminar Pemanan dan Prospek Bisnis BPR Jatim (2011)

Menghadapi masalah terkait laporan keuangan bagi UKM, IASB selaku badan yang berwenang dalam pengembangan akuntansi akhirnya mengeluarkan suatu standar akuntansi untuk UKM yang kemudian dinamakan *IFRS For Small Medium Entities* (IFRS for SMEs) yang diperkenalkan tahun 2009 kemarin. Indonesia sendiri selaku anggota dari IASB telah mengadopsi IFRS for SMEs tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merancang suatu standar pelaporan keuangan bagi UKM yang kemudian dinamakan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2009. Dengan munculnya SAK ETAP ini diharapkan entitas-entitas bisnis yang tidak terdaftar dalam pasar modal dapat mengaplikasikannya sebagai standar akuntansi bagi entitas mereka. Tahun 2010 ini, Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia yang mengurus masalah perbankan nasional telah mewajibkan penerapan SAK ETAP bagi Bank

Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini merupakan langkah awal untuk mensosialisasikan SAK ETAP yang kemudian diproyeksikan untuk menjadi Standar akuntansi yang berterima umum di Indonesia.

Jan Hoesada (2011) menyatakan Usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia sebanyak 51,2 juta unit usaha yang merupakan 99% dari entitas yang ada dan tahun 2010 menunjukkan 95% unit usaha adalah usaha mikro. Sumbangan UMKM kepada PDB tahun 2009 sebesar Rp. 2.360 triliun atau 53% PDB. UMKM ini menyerap 87,5 juta orang atau 98% dari seluruh tenaga kerja yang ada (124 juta orang). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan akuntansi berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jan Hoesada juga menyatakan apabila besaran usaha mikro terlampau kecil untuk diharapkan berakuntansi SAK ETAP, maka mungkin dirancang untuk sekitar 15 juta entitas meliputi 10,65 juta unit usaha kecil, 2,92 juta unit usaha menengah, 12.000 koperasi, 30.000 yayasan dan berbagai jenis ETAP lain. Sedangkan, PSAK Besar berbasis IFRS adalah entitas publik, jumlahnya tak sampai satu promil dari seluruh entitas di Indonesia. Pengguna SAK ETAP diperkirakan 24% dari seluruh entitas di Indonesia.

Kebijakan dan strategi pengembangan BPR ke depan diarahkan sesuai dengan karakteristik BPR yaitu BPR sebagai *community bank* yang sehat, kuat, produktif serta menyebar diseluruh Indonesia dan fokus dalam penyediaan pelayanan jasa keuangan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat setempat khususnya di daerah pedesaan. Menurut Perkembangan sejarah BPR, Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Menurut Perkembangan sejarah BPR, BPR wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM di bidang perbankan sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya.

Teknologi menjadi salah satu bagian dalam setiap kehidupan manusia pada saat ini. Teknologi digunakan karena lebih efektif dalam membantu keperluan para penggunanya termasuk perusahaan. Menurut Debreceny *et al* (2002) dalam Hanny dan Chariri (2007) penggunaan internet menyebabkan pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun dan dimana pun. Internet juga membuat penyajian informasi keuangan lebih menghemat biaya karena perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk mencetak laporan keuangan maupun biaya untuk distribusi laporan keuangan yang tidak berada dalam satu geografis, penyampaian yang lebih cepat, serta dapat meningkatkan frekuensi penyajian dalam FASB (2000) dalam Momany *et al.*, (2006).

Dengan uraian latar belakang di atas peneliti mengambil judul “ ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PEMAHAMAN SAK ETAP DI BANK PERKEREDITAN RAKYAT DI SURABAYA DAN SIDOARJO ”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“ Apakah faktor – faktor (Skala usaha, Sumber daya manusia, dan teknologi) yang mendasari pemahaman SAK ETAP di Bank Perkreditan Rakyat Surabaya dan Sidoarjo “

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

” Untuk menjelaskan faktor – faktor (Skala usah, Sumber daya manusia, dan Teknologi) yang mendasari pemahaman SAK ETAP di Bank Perkreditan Rakyat Surabaya dan Sidoarjo ”

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat menjadi acuan dan pedoman untuk melakukan penelitian yang sejenis.
- b. Bagi BPR di kota Surabaya dan Sidoarjo meningkatkan pemahaman terhadap SAK-ETAP

- c. Bagi para pemilik BPR di kota Surabaya dan Sidoarjo, meningkatkan pemahaman atas SAK-ETAP, sehingga mampu menyajikan informasi akuntansi yang baik dan benar

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah didalam penulisan, penguraian serta penjelasan didalam penulisan proposal skripsi ini maka penulis membagi dalam tiga bagian, yang dimana meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang membandingkan dengan penelitian ini, Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran yang berlandaskan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini diuraikan hal-hal mengenai rancangan dan batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas mengenai hasil dari analisis data yang dilakukan dalam penelitian

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait.